TAHUN
2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN HARUAI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Haruai , September 2024

Camat Haruai

MULYADI, S.Sos, Kp

Pembina (IV/a)

NIP. 19690610 200012 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan..... 7

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024 7

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 12

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah..... 18

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah 19

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **27**

BAB IV PENUTUP..... **35**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaran pada Renja dan APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024	9
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Haruai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	13
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Haruai	19
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong	24
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Haruai Tahun 2024	30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024. Renja Tahun 2024 telah disusun pada tahun 2023 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai Kabupaten TabalongTahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai Kabupaten TabalongTahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan
  - 2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024
  - 2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Haruai sampai dengan triwulan IItahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Haruai dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Haruai dengan APBD Tahun 2024, jumlah kegiatan sudah sesuai dengan APBD induk yaitu sebanyak 13 Kegiatan yang meliputi,: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap Sub Kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Haruai dengan APBD Tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada pada renja tahun 2024 sebanyak 29 sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD Tahun 2024 sebanyak 29.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Anggaran Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 sebesar Rp. **2,931,599,151.00** sedangkan anggaran APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024 sebesar Rp. 3.323.951.281 , Terdapat selisih antara anggaran APBD dan Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 392.352.130,- seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawahini :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024dengan APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	6	6
2	Kegiatan	13	14
3	Sub Kegiatan	29	29
4	Pagu Anggaran	Rp 2.931.599.151	Rp 3.323.951.281

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	UNSUR KEWILAYAHAN			**2.931.599.151,00**		3.323.951.281,00
7.01	KECAMATAN			**2.931.599.151,00**		3.323.951.281,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	B	**2.739.515.151,00**	B	**2.937.617.281,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran danevaluasi Perangkat daerah yang disusun**	**8 Dokumen**	**9.547.650,00**	**8 Dokumen**	**9.547.650,00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 999,900.00	1 Laporan	Rp 999,900.00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 999,900.00	1 Laporan	Rp 999,900.00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan PerangkatDaerah yang disusun**	**20 Dokumen**	**2.069.370.432,00**	**20 Dokumen**	**2.271.572.652,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp 2,067,141,870.00	14 Orang/Bulan	Rp 2,269,344,000.00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 1,274,958.00	2 Laporan	Rp 1,274,958.00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ ~~Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan~~ Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 953,604.00	18 Dokumen	Rp 953,604.00
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerahyang disusun**	**3 Dokumen**	**Rp 1,799,550.00**	**3 Dokumen**	**Rp 1,799,550.00**

7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Rp 1,799,550.00	3 Dokumen	Rp 1,799,550.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**100%**	**194.798.899,00**	**100%**	**194.798.899**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 5,535,459.00	4 Paket	Rp 5,535,459.00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	31,179,130.00	25 Paket	Rp 31,179,130.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp 7,800,310.00	4 Paket	Rp 7,800,310.00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 150,284,000.00	2 Laporan	Rp 150,284,000.00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**10 unit**	**Rp 50,128,620.00**	**10 unit**	**Rp 50,128,620.00**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	Rp 50,128,620.00	10 unit	Rp 50,128,620.00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD**	**100%**	**310.900.000,00**	**100%**	**306.800.000,00**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 28,800,000.00	1 Laporan	Rp 28,800,000.00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 282,100,000.00	1 Laporan	Rp 278,000,000.00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**35 Unit**	**102.970.000,00**	**35 Unit**	**102.970.000,00**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Buah	Rp 76,180,000.00	12 Buah	Rp 76,180,000.00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Rp 14,950,000.00	13 Unit	Rp 14,950,000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	Rp 11,840,000.00	1 Unit	Rp 11,840,000.00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan SosialKemasyarakatan**	**80%**	**63.934.000,00**	**80%**	**58.184.000,00**

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**3 Laporan**	**63.934.000,00**	**3 Laporan**	**58.184.000,00**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp 40,594,000.00	1 Laporan	Rp 40,594,000.00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp 23,340,000.00	2 Dokumen	Rp 17,590,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitasaparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**85%**	**28.400.000,00**	**85%**	**Rp 78.495.269,00**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pemerintah Desa yang dibina/ diberdayakan.**	**13 Desa**	**Rp 7,800,000.00**	**13 Desa**	**Rp 7,800,000.00**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Meningkatkan Kesadaran keluarga mengikuti Penumbuhan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas**	**-**	**Rp 20.600.000.00**	**-**	**Rp 70,695,269.00**
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9021 keluargs	Rp 20.600.000.00	9021 keluarga	Rp 70,695,269.00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)**	**13 Desa**	**Rp 40,440,000.00**	**13 Desa**	**Rp 90,065,000.00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan**	**12 Patroli Terpadu**	**Rp 40,440,000.00**	**12 Patroli Terpadu**	**Rp 90,065,000.00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 40,440,000.00	12 Laporan	Rp 90,065,000.00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahanyang disusun tepat waktu**	**80%**	**Rp 48.380.000**	**80%**	**98.744.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah**	**Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahanumum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 Laporan**	**Rp 48.380.000**	**1 Laporan**	**98.744.000,00**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Rp 38,800,000.00	100 Orang	Rp 88,154,731.00

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Rp 9,580,000.00	12 Dokumen	Rp 10,590,000.00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan danPengawasan PemerintahanDesa***	**85%**	**Rp 10,930,000.00**	**85%**	**Rp 60,845,000.00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi**	**13 Desa**	**Rp 10,930,000.00**	**13 Desa**	**Rp 60,845,000.00**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	13 Dokumen	Rp 10,930,000.00	13 Dokumen	Rp 60,845,000.00

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Haruai sampai triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	UNSUR KEWILAYAHAN		**3.323.951.281,00**		**1.509.704.607,00**	**45,42%**		
7.01	KECAMATAN		**3.323.951.281,00**		**1.509.704.607,00**	**45,42%**		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**2.739.515.151,00**	**B**	**1.454.546.607,00**	**50%**	**50 %**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran danevaluasi Perangkat daerah yang disusun**	**9.547.650,00**	**8 Dokumen**	**-**	**0,00%**	**50%**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1,999,800.00	2 Dokumen	-	100,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1,274,625.00	1 Dokumen	-	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1,274,625.00	1 Dokumen	--	0,00%	-	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 1,499,400.00	1 Dokumen	-	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 1,499,400.00	1 Dokumen	-	0,00%	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 999,900.00	1 Laporan	-	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 999,900.00	1 Laporan	-	0,00%	1 Laporan	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan PerangkatDaerah yag disusun**	**2.271.572.562,00**	**20 Dokumen**	**1.147.441.491**	**51%**	**50,00%**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,269.344.000.00	14 Orang/Bulan	1.147.441.491	51%	6 Bulan	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1,274,958.00	2 Laporan	-	0,00%	1 Laporam	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 953,604.00	18 Laporan	-	0,00%	9 Laporan	

	Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerahyang disusun**	**Rp 1,799,550.00**	**3 Dokumen**	**-**	**0,00**	**1 Dokumen**	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 1,799,550.00	3 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**194.798.899,00**	**100%**	**125.904.093**	**65%**	**60%**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 5,535,459.00	4 Paket	1.581.000-	29%	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31,179,130.00	25 Paket	7.607.100	24%	37,28%	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 7,800,310.00	4 Paket	-	0,00%	6 Bulan	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 150,284,000.00	2 Laporan	116.715.993	78%	6 Bulan	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Rp 50,128,620.00**	**10 unit**	**Rp 44.099.099**	**88%**	**10 Unit**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 50,128,620.00	10 unit	Rp 44.099.099	88%	10 Unit	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD**	**306.800.000,00**	**100%**	**116.033.808,00**	**38%**	**45%**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 28,800,000.00	1 Laporan	10.988.808	**38%**	1 Laporan	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 278,000,000.00	1 Laporan	105.045.000	**38%**	1 Laporan	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**102.970.000,00**	**35 Unit**	**21.068.410**	**20%**	**35 Unit**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 76,180,000.00	12 Unit	21.068.410	**28%**	12 Buah	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 14,950,000.00	13 Unit	-	-	7 Unit	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di Pelihara dan di rehabilitasi	Rp 11,840,000.00	1 Unit	-	-	1 Unit	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial**	**58.184.000,00**	**80%**	**-**	**-**	**80%**	

[redacted]

		Kemasyarakatan						
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**58.184.000,00**	**3 Laporan**	**-**	**-**	**2 Laporan**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 40,594,000.00	1 Laporan	-	-	1 Laporan	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 17.590.000,00	2 Laporan	-	-	1 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitasaparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**Rp 78.495.269,00**	**85%**	**31.508.000**	**40%**	**70 %**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pemerintah Desa yang dibina/diberdayakan.**	**Rp 7,800,000.00**	**13 Desa**	**6.550.000**	**84%**	**13 Desa**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 7,800,000.00	13 Lembaga kemasyarakatan	6.550.000	**84%**	13 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Rp 70.695.269,00**		**24.958.000**	**35%**	**1 Laporan**	
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rp 70.695.269,00	9021 keluarga	24.958.000	**35%**	4500 keluarga	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,Keamanan dan Kenyamanan)**	**Rp 90.065.000.00**	**100 %**	**12.600.000**	**14%**	**100%**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan**	**Rp 90.065.000**	**12 Patroli Terpadu**	**12.600.000**	**14%**	**6 Patroli Terpadu**	**Penyesuaian anggaran pada sub kegiatan**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 90.065.000,00	12 Laporan	12.600.000	**14%**	3 Laporan	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahanyang disusun tepat waktu**	**Rp 98.744.000,00**	**80%**	**11.050.000**	**11%**	**90%**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah**	**Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahanumum sesuai penugasan kepala daerah**		**1 Laporan**	**11.050.000**	**11%**	**1 laporan**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Rp 88.154.731,00	100 Orang	4.500.000	**5%**	30 Orang	

		Kesatuan Republik Indonesia						
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 10.590.000,00	12 Dokumen	6.550.000	**62%**	6 Dokumen	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan danPengawasan PemerintahanDesa***	**Rp60.845.000**	**80%**	**-**	**0%**	**60%**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa**	**Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi**	**Rp 60.845.000**	**13 Desa**	**-**	**0%**	**13 Desa**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 60.845.000,00	13 Dokumen	-	**0%**	13 Dokumen	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Haruai sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Haruai telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.509.704.607,- atau sekitar 45,42 persen dari total anggaran untuk tahun 2024. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan padatriwulan III dan IV, diantaranya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
    d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.
    e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
    f. Koordinasi dan Penyusunan Lapooran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
    g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD.
    b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah.
    a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya.
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
    a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
    a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
9. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan :
    a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Haruai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
7. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
9. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Haruai menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Haruai, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Haruai adalah :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Haruai

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun Berjalan
2	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	Tahun Berjalan
3	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Tahun Berjalan
4	Nilai AKIP	B	B	B	BB	BB	B	B	Tahun Berjalan

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Haruai mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan
   1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
   2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
   3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

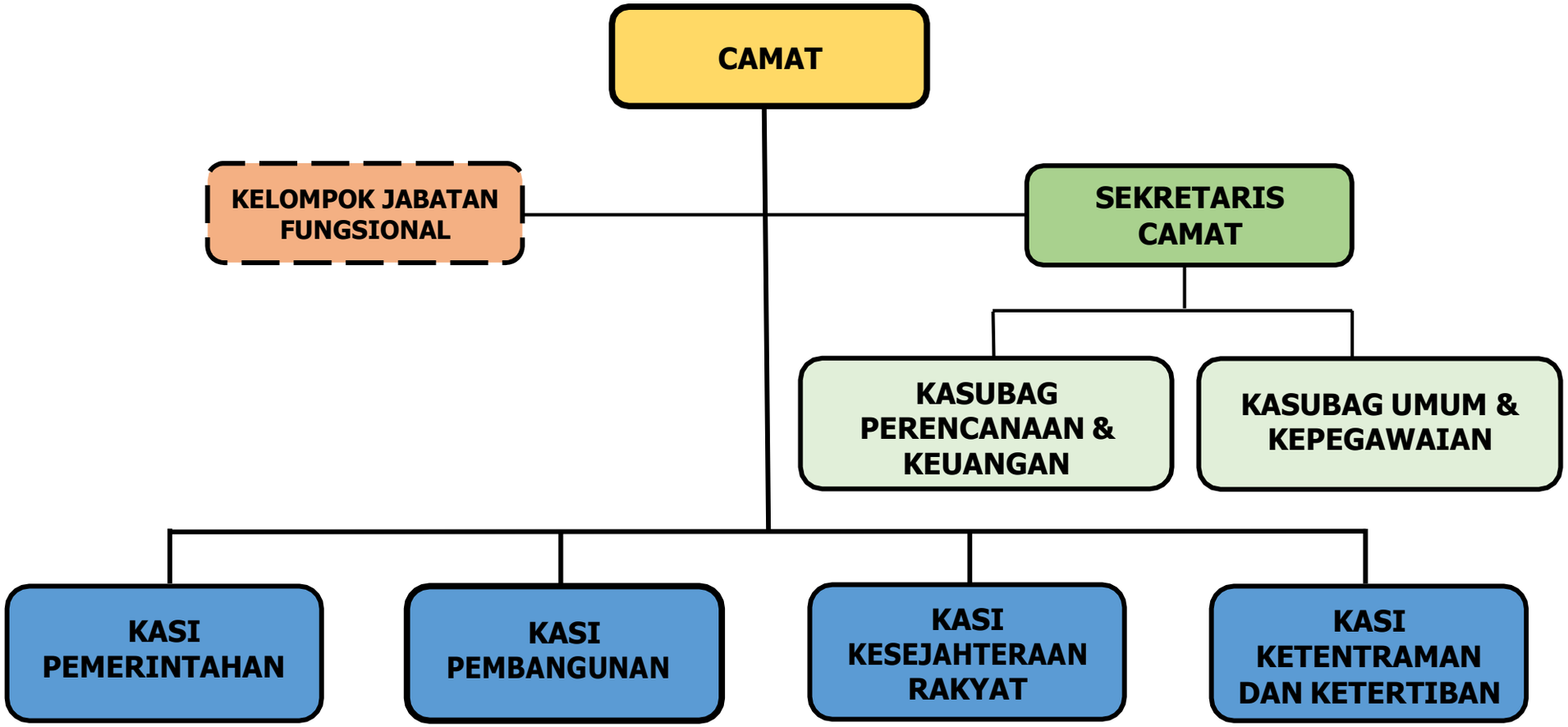
   Kecamatan Haruai memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebaagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

   Fungsi Kecamatan Haruai adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Haruai :

Tabel : Susunan Organisasi Kecamatan Haruai



Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Kecamatan Haruai berpangku pada visi Kabupaten Tabalong **"Menuju Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri"** dengan mengemban misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamanan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).

Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, social budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Haruai dalam memberikanpelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Adanya 3 desa terpencil yang jarak tempuhnya dan kondisi jalannya yang sangat rusak sehingga menyulitkan pihak kecamatan dalam melakukan pembinaan ke desa-desa tersebut.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalitas aparatur Kecamatan Haruai.
3. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja dikalangan aparatur Kecamatan Haruai menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
4. Jumlah SDM Apartur yang kurang memadai.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Haruai juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Haruai dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Haruai, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Haruai yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work).
4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Haruai yang baik.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Haruai adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Haruai merupakan kawasan yang terindikasi memiliki Kawasan kumuh. Untuk mengurangi kekumuhan, mindset masyarakat perlu diubah sehingga tercipta kawasan tanpa kumuh

2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Haruai untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

4. Bidang Pertanian

   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah kecamatan Haruai. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamatan Haruai untuk dijadikan perumahan dan kawasan Industri.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah " Penguatan Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas". RKPD 2024 dalam hal ini mengalami perubahan salah satunya dari segi rumusan program/kegiatan/sub kegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Kecamatan Haruai. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC. HARUAI**	**Nilai AKIP**	**B**	**2.937.617.281,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC. HARUAI**	**Nilai AKIP**	**B**	**3.551.327.555,00**
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah**	**15 Dokumen**	9.547.650,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah**	**15 Dokumen**	9.547.650,00
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumah dokumen perencanaan perangkat daerah	**3 Dokumen**	1.999.800,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumah dokumen perencanaan perangkat daerah	**3 Dokumen**	1.999.800,00
I.1.2	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	**4 Dokumen**	1.274.625,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	**4 Dokumen**	1.274.625,00
I.1.3	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	**4 Dokumen**	1.274.625,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	**4 Dokumen**	1.274.625,00
I.1.4	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	**2 Dokumen**	1.499.400,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	**2 Dokumen**	1.499.400,00
I.1.5	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	**2 Dokumen**	1.499.400,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	**2 Dokumen**	1.499.400,00
I.1.6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD	**2 Laporan**	999.900,00	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD	**2 Laporan**	999.900,00

I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	**4 Laporan**	999.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	**4 Laporan**	999.900,00
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**	2.271.572.562,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**	2.271.572.562,00
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	2.269.344.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	2.269.344.000,00
I.2.2	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan SKPD		Jumah laporan akhir tahuan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahuanan SKPD	2 Laporan	1.274.958,00	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan SKPD		Jumah laporan akhir tahuan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahuanan SKPD	2 Laporan	1.274.958,00
I.2.3	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	953.604,00	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	953.604,00
I.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**1.799.550,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya kegiatan administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**1.799.550,00**
I.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Reencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.799.550,00	Penysunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.799.550,00
I.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya kegiatan administrasi Umum**	**100%**	**194.798.899,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya kegiatan administrasi Umum**	**100%**	**394.213.978,00**
I.4.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Banguann Kantor		Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	6 Paket	5.535.459,00	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Banguann Kantor		Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	6 Paket	5.535.459,00
I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	31.179.130,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	31.179.130,00
I.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	8 Paket	7.800.310,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	8 Paket	7.800.310,00
I.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	150.284.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	349.699.079,00
I.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50.128.620,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**277.788.115,00**

I.5.I	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit	10.161.546,00
I.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang disediakan	4 Unit	50.128.620,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang disediakan	18 Unit	**205.466.569,00**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	62.160.000,00
I.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Disediakan**	**100%**	**306.800.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**312.800.000,00**
I.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	28.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	34.800.000,00
I.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	278.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	278.000.000,00
I.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**43 Unit**	**102.970.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**44 Unit**	**255.605.700,00**
1.7.I	Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya Pemelihaaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajaknya	18 Unit	76.180.000,00	Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya Pemelihaaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	110.560.000,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	25 Unit	14.950.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainya yang dipeliharta'	25 Unit	14.950.000,00
I.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	11.840.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	130.095.700,00
i.8	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah	100%	28.000.000,00
1.8.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14	28.000.000,00
II	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**100%**	**90.065.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**KEC.HARUAI**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**90.065.000,00**
II.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	7 desa	90.065.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	7 desa	90.065.000,00

	Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan		
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah usulan masyarakat yang** Diakomodir	85%	**78.495.269,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**KEC.PUGAAN**	**Jumlah usulan masyarakat yang** Diakomodir	85%	**86.045.269,00**
III.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**	**13 Desa**	**7.800.000,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**	**13 Desa**	**7.800.000,00**
III.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum MUSRENBANG di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum MUSRENBANG di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000,00
III.2	**Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas**	**650 Keluarga**	**70.695.269,00**	**Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas**	**650 Keluarga**	**78.245.269,00**
III.2.1	Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	650 Keluarga	**70.695.269,00**	Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	650 Keluarga	**78.245.269,00**
IV	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**KEC.HARUAI**	***Tingkat keterlibatan masyarakatdalam perencanaan pembangunan***	85%	**60.845.000,00**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**KEC.HARUAI**	***Tingkat keterlibatan masyarakatdalam perencanaanpembangunan***	85%	**60.845.000,00**
IV.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi**	**13 Desa**	**60.845.000,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi**	**13 Desa**	**60.845.000,00**
IV.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemrintahan desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**12 Dokumen**	60.845.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemrintahan desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**12 Dokumen**	**60.845.000,00**
V	**PROGRAM PENYELENGGARRAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM**	**KEC.HARUAI**	**Persentase layanan umum lainnya tepat waktu**	**85%**	**98.744.731,00**	**PROGRAM PENYELENGGARRAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM**	**KEC.HARUAI**	**Persentase layanan umum lainnya tepat waktu**	**85%**	**138.444.731,00**
V.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 Laporan**	**98.744.731,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 Laporan**	**138.444.731,00**

V.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45 Orang	88.154.731,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	69 Orang	127.854.731,00
V.12	Pelaksanaan Tugas Prokopinca		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	8 Dokumen	10.590.000,00	Pelaksanaan Tugas Prokopinca		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instalasi Vertikal Terkait	8 Dokumen	10.590.000,00
VI	**PROGRAM PENYELENGGARRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**KEC.HARUAI**	**Persentase layanan umum lainnya tepat waktu**	**80%**	**58.184.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**KEC.PUGAAN**	**Persentase layanan umum lainnya tepat waktu**	**80%**	**62.184.000,00**
VI.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**11 Laporan**	**58.184.000,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**KEC.PUGAAN**	**Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**11 Laporan**	**62.184.000,00**
VI.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	40.594.000,00	Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	40.594.000,00
VI.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	17.590.000,00	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	21.590.000,00
JUMLAH PAGU KEBUTUHAN TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL ANASLISIS					**3.323.951.281,00**					**3.988.911.555,00**

Keterangan : Untuk angka sebelumnya di File Tabel 2.5 Ranc Renja (Tabel TC 29 yg di kirim ke Bapperida Kabupaten Tabalong.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 merencanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong senilai **Rp 3.890.366.362,-.** Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, dengan anggaran sebesar Rp. 3.417.482.862,- indikator program ini adalah : Persentase layanan umum lainnya tepat waktu dengan target 75% dan Nilai SAKIP (predikat) dengan target B sedangkan kegiatannya meliputi :
  a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dengan rincian sub kegiatan :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/ RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**, dengan anggaran sebesar Rp. 110.248.500,- indikator program ini adalah : Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan di tingkat kecamatan dengan target 80% sedangkan kegiatannya meliputi :
  a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan rincian sub kegiatan :
     - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
     - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**, dengan anggaran sebesar Rp. 91.680.269,- indikator program ini adalah : Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa dengan target 85 % sedangkan kegiatannya meliputi :
  a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
     - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

  b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan., dengan rincian sub Kegiatan :
     - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**, dengan anggaran sebesar Rp. 90.065.000,- indikator program ini adalah : Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)

100 % , dengan target 13 Desa sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian sub kegiatan :
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**, dengan anggaran sebesar Rp. 125.444.731,- indikator program ini adalah : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 80 % sedangkan kegiatannya meliputi :
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
        - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
        - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

- **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**, dengan anggaran sebesar Rp. 55.445.000,- indikator program ini adalah : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 80% sedangkan kegiatannya meliputi :
    a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
        - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Haruai Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PERUBAHAN RENJA 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	Haruai			**2.931.599.151**	PAD		**3.323.951.281**	PAD			**3.890.366.362**	PAD	
7.01	KECAMATAN	Haruai			**2.931.599.151,00**	PAD		**3.323.951.281**	PAD			**3.890.366.362**	PAD	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Haruai	Nilai SAKIP (predikat)	B	**2.739.515.151**	PAD	B	**2.937.617.281,00**	PAD	Nilai SAKIP (predikat)	B	**3.417.482.862**	PAD	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Haruai**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran danevaluasi Perangkat daerah yang disusun**	**8 Dokumen**	9.547.650	**PAD**	**8 Dokumen**	9.547.650	**PAD**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun**	**8 Dokumen**	9.547.650	**PAD**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Haruai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00	PAD	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00	PAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00	PAD	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Haruai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Haruai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Haruai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Haruai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Haruai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Haruai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Haruai**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun**	**20 Dokumen**	**2.069.370.432**	**PAD**	**20 Dokumen**	**2.271.572.562**	**PAD**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun**	**20 Dokumen**	**2.477.298.562**	**PAD**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Haruai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp 2,067,141,870.00	PAD	14 Orang/Bulan	Rp 2,269,344,000.00	PAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp 2.475.070.000	PAD	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Haruai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 1,274,958.00	PAD	2 Laporan	Rp 1,274,958.00	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 1.274.958	PAD	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Haruai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 953,604.00	PAD	18 Laporan	Rp 953,604.00	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 953.604	PAD	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Haruai**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerahyang disusun**	**3 Dokumen**	**Rp 1,799,550.00**	**PAD**	**3 Dokumen**	**Rp 1,799,550.00**	**PAD**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun**	**3 Dokumen**	**Rp 1.799.550**	**PAD**	

7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Haruai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Rp 1,799,550.00	PAD	3 Dokumen	Rp 1,799,550.00	PAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Rp. 1.799.550	PAD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PERUBAHAN RENJA 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Haruai**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**194.798.899**	**PAD**	**100%**	**194.798.899**	**PAD**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**100 %**	**315.498.899,00**	**PAD**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Haruai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 5,535,459.00	PAD	4 Paket	Rp 5,535,459.00	PAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 5,535,459.00	PAD	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Haruai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	31,179,130.00	PAD	25 Paket	Rp 31,179,130.00	PAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	31,179,130.00	PAD	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Haruai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp 7,800,310.00	PAD	4 Paket	Rp 7,800,310.00	PAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp 7,800,310.00	PAD	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Haruai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 150,284,000.00	PAD	2 Laporan	Rp 150,284,000.00	PAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	270.984.000,00	PAD	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Haruai**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**10 unit**	**Rp 50,128,620.00**	**PAD**	**10 unit**	**Rp 50.128.620,00**	**PAD**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**20 unit**	**138.188.201**	**PAD**	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Haruai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	Rp 50,128,620.00	PAD	10 unit	Rp 50,128,620.00	PAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	138.188.201	PAD	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Haruai**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**310.900.000**	**PAD**	**100%**	**306.800.000**	**PAD**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**312.800.000**	**PAD**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Haruai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	Rp 28,800,000.00	PAD	1 Laporan	Rp 28,800,000.00	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Laporan	34.800.000	PAD	

			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							dan Listrik yang Disediakan				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Haruai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 282,100,000.00	PAD	1 Laporan	Rp 278,000,000.00	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 278,000,000.00	PAD	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Haruai**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**35 Unit**	**Rp 102.970.000**	**PAD**	**35 Unit**	**Rp 102.970.000**	**PAD**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**35 Unit**	**162.350.000**	**PAD**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Haruai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp 76,180,000.00	PAD	12 Unit	Rp 76,180,000.00	PAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	110.560.000	PAD	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Haruai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Rp 14,950,000.00	PAD	21 Unit	Rp 14,950,000.00	PAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14.950.000	PAD	
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Haruai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 11,840,000.00	PAD	2 Unit	Rp 11,840,000.00	PAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	36.840.000	PAD	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Haruai**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**80%**	**Rp 63.934.000.00**	**PAD**	**80%**	**Rp 58.184.000**	**PAD**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**80%**	**110.248.500**	**PAD**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Haruai	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	Rp 63.934.000.00	PAD	3 Laporan	Rp 58.184.000	PAD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	110.248.500	PAD	

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Haruai	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp 40,594,000.00	PAD	1 Laporan	Rp 40,594,000.00	PAD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	91.283.500,00	PAD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Haruai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp 23,340,000.00	PAD	2 Dokumen	Rp 17,590,000.00	PAD	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	18.965.000,00	PAD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PERUBAHAN RENJA 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Haruai**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**85%**	**Rp 28.400.000,00**	**PAD**	**75%**	**Rp 78.495.269,00**	**PAD**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitasaparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**85%**	**91.680.269**	**PAD**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Haruai	Jumlah Pemerintah Desa yang di Bina/Di Berdayakan.	13 Desa	Rp 7,800,000.00	PAD	13 Desa	Rp 7,800,000.00		Jumlah Pemerintah Desa yang di Bina/Di Berdayakan.	13 Desa	Rp 7,800,000.00		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Haruai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00	PAD	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00	PAD	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Haruai	Meningkatkan Kesadaran keluarga mengikuti Penumbuhan Kehidupan Menuju Keluarga berkualitas		Rp 20.600.000,00	PAD		Rp 70,695,269.00	PAD	Meningkatkan Kesadaran keluarga mengikuti Penumbuhan Kehidupan Menuju Keluarga berkualitas	100%	Rp 83.880,,269.00	PAD	
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Haruai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9021 keluargs	Rp 20.600.000,00	PAD	9021 keluarga	Rp 70,695,269.00	PAD	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9021 keluarga	Rp 83.880,,269.00	PAD	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Haruai**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan**	**13 Desa**	**Rp 40,440,000.00**	**PAD**	**13 Desa**	**Rp 90,065,000.00**	**PAD**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan**	**13 Desa**	**Rp 90,065,000.00**	**PAD**	

			Kenyamanan)							**Kenyamanan)**				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Haruai	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	Rp 40,440,000.00	PAD	12 Patroli Terpadu	Rp 90,065,000.00	PAD	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli terpadu	Rp 90,065,000.00	PAD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Haruai	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 40,440,000.00	PAD	12 Laporan	Rp 90,065,000.00	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 90,065,000.00	PAD	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Haruai**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**Rp 48.380.000**	**PAD**	**80%**	**98.744.731.00**	**PAD**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	80%	**125.444.731,00**	**PAD**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah	Haruai	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan		PAD	1 Laporan	98.744.731.00	PAD	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahanumum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	125.444.731	PAD	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Haruai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Rp 38,800,000.00	PAD	100 Orang	Rp 88,154,731.00	PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	114.854.731	PAD	

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Haruai	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Rp 9,580,000.00	PAD	12 Dokumen	Rp 10,590,000.00	PAD	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.590.000,00	PAD	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Haruai**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**80%**	**Rp 10,930,000.00**	**PAD**	**80%**	**Rp 60,845,000.00**	**PAD**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	80%	**55.445.000,00**	**PAD**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Haruai	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	13 Desa	Rp 10,930,000.00	PAD	13 Desa	Rp 60,845,000.00	PAD	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	13 Desa	55.445.000,00	PAD	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Haruai	Jumlah Dokumen yang difasulitasi dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa	13 Dokumen	Rp 10,930,000.00	PAD	13 Dokumen	Rp 60,845,000.00	PAD	Jumlah Dokumen yang difasulitasi dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa	13 Dokumen	55.445.000,00	PAD	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Haruai pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Haruai ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Haruai Tahun 2019-2024, sehinggadifokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Haruai ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Haruai ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkamenjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat danstakeholders di Kabupaten Tabalong khususnya di Kecamatan Haruai.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Haruai, September 2024

Camat Haruai

MULYADI, S.Sos, Kp

Pembina (IV/a)

NIP. 19690610 200012 1 005